

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan bilateral antara Sri Lanka dan Tiongkok telah terjalin sejak kemerdekaan Sri Lanka dan dipererat lagi dengan bantuan berupa pendanaan dan dukungan lain yang diberikan kepada Pemerintah Sri Lanka dalam perang sipil melawan kelompok separatis Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).<sup>1</sup> Hal inilah yang membuat Sri Lanka di bawah Pemerintahan Presiden Rajapaksa menjalin kedekatan dengan Tiongkok. Sebagai imbalan bantuan tersebut, Sri Lanka mendukung segala kebijakan luar negeri Tiongkok di kawasan Asia Selatan. Sri Lanka telah melakukan berbagai kerja sama terutama di bidang ekonomi dan pembangunan, serta menandatangani delapan nota kesepahaman selama masa Pemerintahan Mahinda Rajapaksa (2005-2015).<sup>2</sup>

Salah satu kerja sama pembangunan yang dilakukan adalah proyek Pelabuhan Hambantota yang diinisiasi oleh Pemerintah Sri Lanka. Pembangunan pelabuhan ini meliputi fasilitas pengisian bahan bakar dan depot minyak, bangunan administrasi, operasi kapal *Roll-on/Roll-off* (Ro-Ro), yaitu kapal kargo yang membawa kendaraan beroda, perlengkapan, serta pulau buatan. Proyek ini dibiayai dan dibangun oleh Tiongkok yang merupakan donor mayor dalam pemberian bantuan finansial Sri Lanka, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China

---

<sup>1</sup> Patrick Hein. "Riding with the Devils: China's Role in the Cambodian and Sri Lankan Conflicts." *India Quarterly* vol. 73, no. 1 (2017): 9–12.

<sup>2</sup> Saman Kelegama. "China-Sri Lanka Economic Relations: An Overview." *China Report* vol. 50, no. 2 (2014): 132–133.

Merchant Port Holdings Company Limited (CMPort). Pembangunan dibagi atas 3 fase, yaitu fase I (15 Januari 2008 – 18 November 2010) dengan biaya sekitar 505 juta USD, fase II (25 November 2012 – 15 Juli 2015) sebesar 809,4 juta USD, serta fase III yang direncanakan mulai tahun 2018 dan selesai pada tahun 2021, tetapi pembangunannya belum dimulai.<sup>3</sup>

Pelabuhan Hambantota merupakan proyek pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah Sri Lanka melalui Sri Lanka Port Authority (SLPA) dalam upaya memaksimalkan posisi geostrategisnya. Pelabuhan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan perdagangan Sri Lanka karena Hambantota terletak di salah satu jalur perkapalan tersibuk di dunia, hanya berjarak 10 mil laut dari jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dan Eropa, Terusan Suez dan Selat Malaka.<sup>4</sup> Selain itu, pelabuhan ini juga menjadi tempat transit yang dekat dengan India dan Afrika, sehingga dapat menciptakan peluang akses untuk memperluas pasar di subkontinen India.

Pelabuhan Hambantota dibangun dengan tujuan meringankan beban Pelabuhan Kolombo yang merupakan pelabuhan tersibuk dengan peringkat ke-24 di dunia.<sup>5</sup> Pelabuhan ini dijadikan pelabuhan transit sebelum kapal melanjutkan perjalanan ke pelabuhan lain. Dua puluh jalur perkapalan Asia bertemu di Pelabuhan Kolombo, hal tersebut membuat pelabuhan ini memiliki koneksi yang kuat dengan pelabuhan

---

<sup>3</sup> Center for Strategic & International Issues. "Hambantota Deep Sea Port Phase I (PPP)." *Reconnecting Asia*. 2020. Diakses pada 5 Oktober 2020. <https://reconnectingasia.csis.org/database/projects/hambantota-deep-sea-port-phase-i-ppp/3a42824b-5fb2-479f-b21f-cc39db2c6eb4/>.

<sup>4</sup> Adhe Nuansa Wibisono. "China's 'Belt and Road Initiative' in Sri Lanka: Debt Diplomacy in Hambantota Port Investment." *MANDALA* vol. 2, no. 2 (2019): 223.

<sup>5</sup> Lloyd's List Intelligence. "One Hundred Ports 2019." *Maritime Intelligence*. 2019. Diakses pada 9 Mei, 2020. <https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2019#filter>.

lain di Asia Selatan dan Afrika, yang mana 30% dari jalur perdagangan kapal-kapal dari pelabuhan tersebut melalui Kolombo sehingga sektor teknologi dan pelayanan dapat menjadi potensi investasi untuk mewujudkan jalur perkapalan yang lebih besar lagi.<sup>6</sup> Melalui proyek ini, Pemerintah Sri Lanka berekspektasi Sri Lanka menjadi pusat perdagangan dan logistik, serta dapat menciptakan 80.000 lapangan kerja baru.

Proyek seluas 1.235 hektar di Sri Lanka bagian selatan ini telah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Sri Lanka sejak tahun 2002. Intensi Sri Lanka untuk mewujudkan proyek Pelabuhan Hambantota ini sejalan dengan Jalur Sutra milik Tiongkok, negara yang memiliki kedekatan dengan Sri Lanka. Bagi Tiongkok, dengan terlibat dalam proyek ini, ia bisa melindungi keamanan energinya karena dua pertiga jalur impor minyak Tiongkok berada di jalur ini.<sup>7</sup> Melalui Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok mampu membuka prospek bagi Sri Lanka untuk pusat perdagangan dan logistik regional. Ketersediaan dana Tiongkok mampu membantu Sri Lanka yang terkendala dalam pendanaan proyek yang membutuhkan miliaran USD ini.

BRI juga mampu memainkan peran penting dalam meningkatkan rantai nilai global Sri Lanka dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa melalui pembangunan infrastruktur. Keterbatasan finansial mengakibatkan rantai nilai global perdagangan Sri Lanka bergantung pada investasi berskala medium, di mana manufaktur Sri Lanka jauh lebih rendah daripada negara lain.<sup>8</sup> Manufaktur ini

---

<sup>6</sup> Janaka Wijayasiri, dan Nuwanthi Senaratne. "China's Belt and Road Initiative (BRI) and Sri Lanka" (2018): 373–397.

<sup>7</sup> Janaka Wijayasiri, dan Nuwanthi Senaratne: 388.

<sup>8</sup> Janaka Wijayasiri, dan Nuwanthi Senaratne: 392.

meningkat pesat jika logistik dan zona industri Hambantota beroperasi dengan baik, dengan BRI, Sri Lanka memiliki akses ke pasar yang memiliki diversifikasi barang dan jasa, yang sebelumnya sulit untuk diakses.

Di bawah Pemerintahan Mahinda Rajapaksa, SLPA mulai membuka pintu untuk investor dan pemberi pinjaman secara terbatas untuk tahun 2010. Tiongkok melalui Export-Import Bank (Exim Bank) merupakan pihak pertama yang mengajukan diri dan memberikan bantuan berupa pinjaman sebesar 307 juta USD dengan syarat pembangunan pelabuhan harus dilaksanakan oleh perusahaan milik Tiongkok, China Harbour Engineering Company dan pekerjanya juga didatangkan dari Tiongkok.<sup>9</sup> Pada masa Pemerintahan Rajapaksa inilah Sri Lanka banyak menerima pinjaman dan bantuan dari Tiongkok, serta menandatangani berbagai kesepakatan terkait investasi terutama di bidang infrastruktur, sehingga keterlibatan Tiongkok dalam proyek ini semakin tinggi karena kebijakan Rajapaksa membukakan pintu untuk investor dan pemberi pinjaman dana dari Tiongkok.<sup>10</sup>

Pada perjalanannya, Pelabuhan Hambantota yang diharapkan dapat menunjang perekonomian negara sejak pertama kali mulai beroperasi masih belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka telah membuat kebijakan bahwa setiap kapal yang membawa mobil impor menuju Pelabuhan Kolombo harus menurunkan kargonya di Hambantota dengan tujuan memulai tumbuhnya bisnis di sana. Tetapi, meskipun jalur perairan sekitar Hambantota adalah jalur yang strategis, kapal yang bersandar di pelabuhan ini sangat sedikit. Sehingga Sri Lanka kembali melakukan pinjaman pada Tiongkok

---

<sup>9</sup> Adhe Nuansa Wibisono. "China's 'Belt and Road Initiative' in Sri Lanka: Debt Diplomacy in Hambantota Port Investment." MANDALA vol. 2, no. 2 (2019): 232-233.

<sup>10</sup> Adhe Nuansa Wibisono: 223.

pada tahun 2010 untuk meningkatkan pelabuhan. Tetapi kemudian, berdasarkan laporan tahunan Menteri Keuangan Sri Lanka, tercatat hanya ada 34 kapal yang merapat di Hambantota pada tahun 2012, berbanding terbalik dengan pelabuhan Kolombo yang disinggahi 3667 kapal.<sup>11</sup>

Pelabuhan yang dinilai strategis ini justru mengalami defisit dalam jumlah besar akibat besarnya biaya operasional dan utang kepada Tiongkok tidak dapat ditutupi dengan pendapatan yang dihasilkan. Bahkan, dilihat dari data Departemen Sensus dan Statistik Sri Lanka tahun 2017, ditemukan bahwa Pelabuhan Hambantota merupakan satu-satunya pelabuhan yang mengalami penurunan persentase pertumbuhan jumlah kunjungan kapal tahunan dan penurunan performa dalam kemampuan penanganan jumlah kargo. Sri Lanka kesulitan dalam pembayaran utang karena tingginya bunga yang diberlakukan Tiongkok, yakni 6.3%.<sup>12</sup> Hal ini berujung kepada krisis utang, di mana Sri Lanka mengalami krisis utang dan kehilangan kemampuan dalam membayar utang yang telah mencapai 77.6% dari GDPnya kepada Tiongkok yang jatuh tempo pada akhir tahun 2016.<sup>13</sup>

Proyek Pelabuhan Hambantota yang semula diyakini mampu meningkatkan perekonomian negara karena posisinya yang strategis, serta tingginya keterlibatan Tiongkok dalam pendanaan proyek tersebut justru berujung defisit besar. Hal ini mengakibatkan Sri Lanka mengalami krisis utang, yaitu suatu kondisi di mana negara tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar bunga utang maupun utang pokoknya. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena kerja sama antara Sri

---

<sup>11</sup> Adhe Nuansa Wibisono: 235.

<sup>12</sup> Adhe Nuansa Wibisono: 231.

<sup>13</sup> I Gst Ngr Arya Permana Putra, Idin Fasisaka, dan Anak Agung Ayu Intan Prameswari. "Kepentingan Tiongkok Dalam Akusisi Pelabuhan Hambantota Sri Lanka." *Jurnal Hubungan Internasional* vol. 1, no. 1 (2019): 1-3.

Lanka dan Tiongkok dalam pembangunan Pelabuhan Hambantota yang dinilai strategis justru menimbulkan kerugian di salah satu pihak, yaitu krisis utang yang dialami Sri Lanka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sri Lanka ingin membangun pelabuhan di Hambantota yang terletak di salah satu jalur perkapalan tersibuk di dunia karena sadar posisinya yang sangat strategis dan peluang keuntungan yang didapatkannya jika membangun pelabuhan di sana, namun hal tersebut terhalang oleh keterbatasan dana. Tiongkok pun memberikan pinjaman dalam jumlah besar untuk merealisasikan proyek ini karena dinilai menguntungkan bagi negaranya. Tetapi, sejak pertama kali pelabuhan ini mulai beroperasi belum juga memberikan keuntungan yang signifikan bagi Sri Lanka dan malah membuat Sri Lanka justru mengalami kerugian hingga mengalami defisit yang besar. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Sri Lanka tidak mampu membayar utangnya pada Tiongkok dan berujung pada krisis utang.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah, “Mengapa Sri Lanka mengalami krisis utang dalam kerja sama pembangunan Pelabuhan Hambantota?”

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab krisis utang Sri Lanka akibat proyek kerja sama pembangunan Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional dan diharapkan dapat menambah pemahaman tentang penyebab krisis utang Sri Lanka akibat proyek kerja sama pembangunan Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok.
2. Secara praksis, menambah referensi bacaan di pustaka jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang masih minim kajian ekonomi politik global dan sebagai *lesson learnt* bagi Indonesia yang sedang gencar melakukan pembangunan.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam menulis penelitian ini, terdapat beberapa rujukan atau tulisan yang dianggap relevan sebagai acuan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka pertama adalah artikel dengan judul “How Sri Lanka Walked into a Debt Trap, and the Way Out”.<sup>14</sup> Jebakan utang erat kaitannya dengan krisis utang, yang mana negara yang terkena jebakan utang tentunya negara yang tengah mengalami krisis utang. Artikel ini menjelaskan proses Sri Lanka mengalami jebakan utang akibat hubungannya dengan Tiongkok. Ashok K. Behuria menemukan bahwa di bawah Pemerintahan Presiden Rajapaksa, Sri Lanka bergantung terhadap Tiongkok karena tingginya kebutuhan dana untuk pembangunan. Sri Lanka yang semakin bergantung pada Tiongkok ini pun cenderung selalu mengandalkan pinjaman Tiongkok sebagai

---

<sup>14</sup> Ashok K. Behuria, “How Sri Lanka Walked into a Debt Trap, and the Way Out.” *Strategic Analysis* vol. 42, no. 2 (2018): 168–178.

solusi jangka pendek dan menengah untuk pembangunan pasca konflik dengan janji pemulihan ekonomi.

Sri Lanka dan Tiongkok memandang aliran peminjaman dana ini sebagai *win-win solution*, di mana Sri Lanka dapat mendorong perekonomiannya dan Tiongkok dapat meningkatkan eksistensinya di Asia Selatan. Terlebih, karakter Tiongkok yang tidak peduli aspek *good governance* dan demokrasi semakin memudahkan Sri Lanka yang otoriter. Sementara bagi Tiongkok, Rajapaksa adalah pemimpin yang siap untuk mengorbankan hubungannya dengan India dan memungkinkan Tiongkok untuk memiliki presensi strategis di Sri Lanka. Beban utang semakin menjerat Sri Lanka dan pemulihan ekonomi yang dijanjikan masih belum terlihat. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan utang dari yang semula 68.7% menjadi 79.3% dari GDP. Presiden berikutnya, Maithripala Sirisena pun kesulitan akibat beban utang yang ditinggalkan Rajapaksa dan berujung pada ditandatanganinya perjanjian konsesi yang menyepakati bahwa Tiongkok mengakuisisi 85% saham pelabuhan.

Tinjauan pustaka kedua adalah tulisan yang berjudul “An Investigation of the Relationship of External Public Debt with Budget Deficit, Current Account Deficit, and Exchange Rate Depreciation in Debt Trap and non-Debt Trap Countries ”.<sup>15</sup> Tulisan ini meneliti hubungan utang publik eksternal dengan defisit anggaran, defisit transaksi berjalan, dan depresiasi nilai tukar dengan pendekatan empiris di negara jebakan utang dan negara non-jebakan utang. Pertama, penulis menemukan bahwa tingginya utang publik adalah kutukan bagi negara dan persoalan peningkatan beban utang luar negeri di negara Asia Selatan mengakibatkan

---

<sup>15</sup> Noor Alam, dan Fauzia Md. Taib. “An Investigation of the Relationship of External Public Debt with Budget Deficit, Current Account Deficit, and Exchange Rate Depreciation in Debt Trap and Non-Debt Trap Countries.” *European Scientific Journal* vol. 9, no. 22 (2013): 144–158.



terjadinya peningkatan rasio utang terhadap *Gross Domestic Product* (GDP). Kedua, utang adalah salah satu alternatif penting untuk menutupi defisit anggaran. Kemudian, untuk mendanai defisit anggaran yang lebih besar, pemerintah harus melakukan pinjaman kembali kepada pihak swasta domestik maupun kepada pihak asing. Ketiga, ketika terjadi defisit transaksi berjalan, pemerintah menutupi defisit tersebut dengan melakukan pinjaman kepada bank internasional. Keempat, saat nilai tukar mengalami depresiasi, artinya nilai mata uang asing menjadi semakin tinggi ketika dikonversikan dari mata uang negaranya. Akibatnya, beban utang luar negeri menjadi semakin tinggi pula.

Tinjauan pustaka ketiga adalah artikel yang berjudul “Macroeconomic Impact of Public Debt and Foreign Aid in Sri Lanka”.<sup>16</sup> Artikel ini menjelaskan dampak utang publik dan bantuan luar negeri terhadap pendapatan, tingkat harga, dan suku bunga pasca kemerdekaan Sri Lanka. Dalam hal tertentu, utang publik dan utang luar negeri dapat menekan pendapatan dan menstimulasi tingkat harga, sementara bantuan luar negeri mampu merusak pendapatan dan tingkat harga. Utang dan bantuan luar negeri dapat meningkatkan suku bunga, baik dalam jangka pendek maupun panjang, sementara utang domestik tidak memberikan dampak yang signifikan.

Penulis mengemukakan bahwa utang dan bantuan luar negeri sangat diperlukan oleh negara berkembang yang berada pada tahap awal pembangunan. Tetapi, suku bunga pinjaman Tiongkok sangat tinggi (6.3%) sehingga Sri Lanka sangat dibebani oleh utang publik. Hasil penelitian dalam artikel ini menemukan bahwa utang

---

<sup>16</sup> Biswajit Maitra. “Macroeconomic Impact of Public Debt and Foreign Aid in Sri Lanka.” *Journal of Policy Modeling* vol. 42, no. 2 (2019): 372–294.

publik dan bantuan luar negeri di Sri Lanka gagal dalam meningkatkan pendapatan dan justru meningkatkan tingkat harga serta suku bunga. Pada akhirnya, tingginya utang yang harus dibayar menjadi tantangan besar bagi negara ini. Dalam jangka pendek, defisit anggaran dapat dikurangi dengan menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran, tetapi dalam jangka panjang, satu-satunya solusi adalah pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan. Tetapi kesulitannya adalah Sri Lanka tidak menyediakan analisis ekonometrik untuk mewujudkannya.

Tinjauan pustaka keempat adalah “China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Sri Lanka”.<sup>17</sup> Tulisan ini menjelaskan latar belakang BRI, hubungan ekonomi Tiongkok dengan Sri Lanka, khususnya dampak BRI terhadap perekonomian Sri Lanka. BRI membawa keuntungan dan kerugian bagi Sri Lanka. Keuntungannya adalah meningkatnya perdagangan, investasi, *hard and soft infrastructure*, pusat ekonomi, pembangunan *Global Value Chains* (GVCs), peningkatan pariwisata, penemuan dan pemanfaatan sumber daya maritim, transfer teknologi, serta terbukanya lapangan pekerjaan. Di sisi lain, kerugiannya adalah adanya *power rivalry*, *autonomy* dan *independence*, meningkatnya beban utang, minimnya transparansi dan banyaknya korupsi, rendahnya hasil investasi, munculnya persepsi dan oposisi dari masyarakat, meningkatnya polisi, serta perubahan dalam pemerintah dan kebijakan. Kesuksesan BRI bagi Tiongkok ini justru bisa menjadi resiko dan kerugian bagi Sri Lanka.

---

<sup>17</sup> Janaka Wijayasiri, dan Nuwanthi Senaratne. “China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Sri Lanka” (2018): 373–397.

Tinjauan pustaka kelima adalah artikel berjudul “What Money Can’t Buy: The Security Externalities of Chinese Economic Statecraft in Post-War Sri Lanka.”<sup>18</sup> Darren J. Lim dan Rohan Mukherjee membahas tentang studi kasus pengaruh ekonomi Tiongkok di Sri Lanka secara empiris sejak tahun 2009. Penelitian menemukan bahwa sifat interdependensi antara Sri Lanka dan Tiongkok bukanlah dalam hubungan perdagangan, melainkan keuangan dan investasi. Bantuan luar negeri sering diikuti dengan patronase dan korupsi di lingkungan elit penguasa. Pengaruh negara pengirim dapat meningkat ketika negara target menjadi dependen dalam melanjutkan arus bantuan dan modal investasi untuk mendanai pertumbuhan ekonomi serta pembangunan atau mengatasi defisit neraca pembayaran. Dengan demikian, negara pengirim dapat menggunakan modal untuk menekan negara penerima agar membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan negara pengirim itu sendiri. Pada tulisan ini, penulis mengatakan bahwa proyek pembangunan di Sri Lanka yang didanai oleh Tiongkok bukanlah berupa hibah dalam ODA, melainkan pinjaman.

Lim dan Mukherjee menemukan empat sumber kekuatan Tiongkok. Pertama, beban utang, yang mana Sri Lanka bergantung pada utang sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Kedua, kegagalan proyek. Dalam hal ini, seharusnya utang tidak menjadi beban jika setidaknya satu dari dua kondisi terpenuhi, yaitu proyek mampu menghasilkan pajak yang memenuhi pembayaran utang atau proyek mampu membantu perkembangan kapasitas dan keahlian lokal. Hal ini menjadi masalah karena proyek tidak mampu menghasilkan pajak yang cukup dan

---

<sup>18</sup> Darren J. Lim, dan Rohan Mukherjee. “What Money Can’t Buy: The Security Externalities of Chinese Economic Statecraft in Post-War Sri Lanka.” *Asian Security* vol. 15, no. 2 (2017): 73–92.

pembangunan proyek yang hanya melibatkan pekerja Tiongkok. Ketiga, minimnya informasi yang dapat diakses oleh publik. Akibatnya, partai oposisi tidak mengetahui bagaimana detail utang tersebut dan ketika mereka menduduki kursi pemerintahanpun, mereka tidak memiliki posisi yang bagus dalam negosiasi utang. Keempat, korupsi, di mana proyek disalahgunakan oleh penguasa, tidak dilakukan demi keuntungan ekonomi jangka panjang, melainkan untuk kepentingan politik atau pribadi.

Tinjauan pustaka di atas berkontribusi dalam memberi arahan dan batasan bagi penelitian ini. Tinjauan pustaka pertama meneliti menjelaskan proses Sri Lanka mengalami jebakan utang akibat hubungannya dengan Tiongkok, artikel ini membimbing penulis dalam melihat situasi Sri Lanka dan hal-hal yang dilaluinya sebelum mengalami krisis utang. Tinjauan pustaka kedua mendeskripsikan hubungan utang publik eksternal dengan defisit anggaran, defisit transaksi berjalan, dan depresiasi nilai tukar dengan pendekatan empiris di negara jebakan utang dan negara non-jebakan utang, artikel ini mengarahkan penulis untuk melihat hal-hal yang berpengaruh dan mendorong terjadinya krisis utang akibat utang luar negeri. Tinjauan pustaka ketiga menjelaskan dampak utang publik dan bantuan luar negeri terhadap pendapatan, tingkat harga, dan suku bunga pasca kemerdekaan Sri Lanka, artikel ini membimbing penulis memahami dampak utang publik terhadap ekonomi makro hingga krisis utang bisa terjadi. Tinjauan pustaka keempat menganalisis hubungan ekonomi antara kedua negara dan dampak BRI terhadap perekonomian Sri Lanka, artikel ini membantu penulis memahami bagaimana proses terjadinya krisis utang Sri Lanka. Tinjauan pustaka kelima membahas tentang pengaruh ekonomi Tiongkok di Sri Lanka secara empiris dan hal-hal yang menjadi sumber

kekuatan Tiongkok. Dari kelima literatur tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang menganalisis dan menjelaskan mengapa Sri Lanka mengalami krisis utang akibat proyek Pelabuhan Hambantota.

## **1.7 Kerangka Konsep**

Krisis utang Sri Lanka dalam studi Ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari kajian ekonomi politik global. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan konsep krisis utang untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian.

### **1.7.1 Krisis Utang**

Krisis utang memiliki berbagai definisi yang sejatinya merujuk pada hal yang serupa. Gary A. Dymksi mengatakan bahwa krisis utang terjadi ketika jumlah utang suatu negara tidak mampu lagi dibayar tanpa menekan tingkat pengeluaran secara radikal atau tanpa melakukan negosiasi kembali terkait ketentuan pembayaran utang.<sup>19</sup> Andrea Pescatori dan Amadou N. R. Sy menuliskan bahwa Moody's mengartikannya sebagai situasi ketika terjadi pembayaran bunga ataupun utang pokok yang tertunda atau tak terbayarkan, dan Standard and Poor's mendefinisikannya sebagai kegagalan negara peminjam untuk membayar utang tepat waktu atau ketika negara harus membuat kesepakatan baru terkait utang tersebut.<sup>20</sup> Selain itu, krisis utang menurut Detragiache dan Spilimbergo merupakan situasi di mana adanya perjanjian penjadwalan kembali atau perjanjian

---

<sup>19</sup> Gary A. Dymksi. "The International Debt Crisis." In *The Handbook Of Globalisation*, disunting oleh Jonathan Michie, 117. Edisi 2. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2011.

<sup>20</sup> Andrea Pescatori, dan Amadou N. R. Sy. *Debt Crises and the Development of International Capital Markets*, 2004.

restrukturisasi utang antara debitur dan kreditor karena tunggakan utang yang tidak mampu dibayar.<sup>21</sup> T. D. Willett dan C. Wihlborg mengartikan krisis utang sebagai situasi ketika jumlah utang negara dan defisit fiskal mengakibatkan terjadinya peningkatan keraguan negara kemampuan atau kemampuannya untuk melunasi utangnya.<sup>22</sup> Theodore H. Cohn menyatakan bahwa krisis utang terjadi ketika negara debitur tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar bunga dan/atau utang pokoknya.<sup>23</sup> Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa krisis utang adalah situasi dimana suatu negara kehilangan kemampuannya dalam membayar utang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep krisis utang menurut Theodore H. Cohn karena ia tak hanya menjelaskan penyebab krisis utang saja, tetapi juga pembagian jenis-jenis krisis utang.

Cohn mengatakan bahwa negara yang lebih memilih untuk mendanai daripada menyesuaikan kondisi dengan defisit yang tengah dialaminya harus melakukan pinjaman dari sumber eksternal dan/atau mengurangi nilai mata uangnya, dan jika negara meminjam secara terus-menerus, maka negara terbebani dengan utang luar negeri yang semakin bertambah.<sup>24</sup> Berdasarkan keparahan dan cara penyelesaiannya, Cohn membagi krisis utang ke dalam dua jenis. Pertama, permasalahan utang yang bersifat sementara, yaitu masalah likuiditas, di mana negara melakukan pinjaman baru untuk membayar utangnya. Kedua, permasalahan utang yang bersifat tidak terdefinisikan (waktu tak hingga), yaitu masalah solvabilitas (kemampuan membayar utang), di mana debitur hanya mampu

---

<sup>21</sup> Andrea Pescatori dan Amadou N. R.Sy.

<sup>22</sup> T.D. Willett, dan C. Wihlborg. "Varieties of European Crises." In *Handbook of Safeguarding Global Financial Stability*, disunting oleh Gerard Caprio, 309. Elsevier Inc., 2012.

<sup>23</sup> Theodore H. Cohn. "Foreign Debt and Financial Crisis." Dalam *Global Political Economy*. Edisi 6. Boston: Peason Education, Inc., 2012.

<sup>24</sup> Theodore H. Cohn.

mendapatkan kelayakan kreditnya kembali hanya jika kreditur mengurangi bunga atau pinjaman pokok dari utang yang diberikannya. Cohn menyatakan bahwa terdapat dua penyebab terjadinya krisis utang, yaitu:

1. Tindakan tak bertanggung jawab pihak pemberi pinjaman (kreditur)

Dalam hal ini, bank yang merupakan pihak pemberi pinjaman meningkatkan jumlah pinjaman secara agresif kepada negara berkembang tanpa memperhatikan kelayakan kredit atau aktivitas apa yang didanai oleh negara tersebut. Bank memberlakukan suku bunga yang rendah dalam pinjaman tersebut karena adanya kompetisi dari pihak pemberi pinjaman lainnya, yang mana hal ini mengakibatkan negara berkembang tidak mendapatkan sinyal atau tanda-tanda kapan untuk berhenti meminjam. Setelah negara ini menjadi sangat dependen terhadap pinjaman bank tersebut, suku bunga meningkat drastis dan hal ini meningkatkan keparahan krisis utang itu sendiri. “Dorongan pinjaman” dari bank mendorong negara debitur untuk meningkatkan liabilitasnya.

2. Tindakan tak bertanggung jawab pihak peminjam (debitur)

Pihak debitur melakukan pinjaman pada bank untuk menghindari ketentuan dan persyaratan dari International Monetary Fund (IMF) yang baginya memberatkan. Prinsip dasar IMF bahwa negara yang sedang berutang tidak boleh memiliki akses tak terbatas atas pembiayaan neraca pembayaran dan harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu, menjadi terancam karena adanya akses peminjaman pada bank.<sup>25</sup> Cohn menuliskan bahwa politik domestik negara debitur juga berkontribusi dalam terjadinya

---

<sup>25</sup> Theodore H. Cohn.

krisis utang, karena meskipun beberapa negara menggunakan pinjaman yang mereka dapatkan untuk mendanai investasi produktif dan pertumbuhan ekonomi, tetapi banyak juga yang digunakan untuk investasi yang buruk, meningkatkan pengeluaran negara, impor barang mewah, dan korupsi. Beberapa negara berkembang memperbaiki kebijakannya ketika mengalami krisis utang, tetapi negara yang tidak ingin atau tidak mampu mengubahnya juga tidak kalah banyak. Pemerintah yang memiliki niat baik sering kali kekurangan dukungan dan kapasitas politik untuk melakukan reformasi ekonomi.

Konsep krisis utang oleh Theodore H Cohn digunakan karena konsep ini dinilai sebagai pisau analisis yang tepat dalam menjawab pertanyaan penelitian. Konsep ini digunakan untuk meneliti penyebab terjadinya krisis utang Sri Lanka akibat kerjasama pembangunan dengan menyelidiki tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok sebagai kreditur maupun Sri Lanka sebagai debitur yang dikategorikan ke dalam tindakan tak bertanggung jawab. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, konsep dioperasionalkan sesuai bagan 1.1.



Bagan 1.7.1 Operasionalisasi Konsep

Sumber: Theodore H. Cohn. "Foreign Debt and Financial Crisis." Dalam *Global Political Economy*. Edisi 6. Boston: Peason Education, Inc., 2012.



## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan analisis eksplanatif. Menurut Alan Bryman, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah jenis penelitian yang menekankan pendekatan induktif dalam mencari relasi antara teori dan objek yang diteliti.<sup>26</sup> Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk membuat penjelasan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang dianalisis dengan konsep yang digunakan.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif untuk menganalisis penyebab terjadinya krisis utang di Sri Lanka akibat proyek kerja sama Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok. Penelitian eksplanatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang difokuskan kepada analisis keterkaitan antar variabel dalam meneliti suatu fenomena atau isu secara mendalam dan terperinci. Penggunaan penelitian eksplanatif ditujukan agar dapat menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara cermat dan lengkap. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penyebab terjadinya krisis utang di Sri Lanka akibat kerja sama Proyek Hambantota dengan Tiongkok.

---

<sup>26</sup> Hossein Nassaji. *Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis, Language Teaching Research*. Canada: University of Victoria, 2015.

## 1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ditentukan agar penelitian lebih fokus pada hal yang dijelaskan. Penulis membagi batasan penelitian menjadi dua hal, yaitu:

- a. Batasan isu: Penelitian ini difokuskan kepada penyebab terjadinya krisis utang yang dialami Sri Lanka akibat proyek Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok.
- b. Batasan waktu: Penelitian difokuskan pada tahun 2008 hingga 2016, yang mana pada tahun 2008 ini proyek konstruksi Pelabuhan Hambantota dimulai dan tahun 2016 adalah tahun terjadinya krisis utang Sri Lanka.

## 1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan variabel dependen yang artinya objek yang hendak dideksripsikan dalam penelitian dan unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis.<sup>27</sup> Unit analisis dari penelitian ini adalah Sri Lanka, sementara unit eksplanasinya adalah proyek Pelabuhan Hambantota. Level analisis penelitian ini berada pada level negara.

## 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari luar, baik dari sumber publik ataupun dari orang yang telah pernah bekerja atau meneliti subjek terkait, yang mana jenis data ini bisa didapatkan dalam bentuk data yang sudah ataupun belum

---

<sup>27</sup> Laura Roselle, dan Sharon Spray. *Research and Writing in International Relations*. London: Longman Pearson, 2008.

dipublikasikan, dan dokumen publik maupun privat.<sup>28</sup> Dokumen dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber selama dokumen tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh berasal dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, laporan penelitian, laporan tahunan Kementerian Sri Lanka, situs resmi proyek Pelabuhan Hambantota, CMPort, dan website resmi pemerintah, serta portal berita faktual yang terkait dengan hubungan ekonomi politik Sri Lanka-Tiongkok, situasi keuangan Sri Lanka, juga Pelabuhan Hambantota.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga tahap yang dilakukan dalam teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>29</sup> Pertama, reduksi data adalah mengorganisir dan menyusun data berdasarkan isu dan konsep yang disusun secara sistematis. Selanjutnya, penyajian data, yaitu penarikan hubungan data dengan kerangka konseptual yang digunakan. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang ini merupakan tahapan evaluasi dari analisis yang telah dilakukan dan juga merupakan hasil temuan yang didapatkan.

Di dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengkategorisasi dan mengorganisasi data berdasarkan kata kunci yang relevan seperti bantuan luar

---

<sup>28</sup> Uma Nath Baral. “‘Research Data’ in Social Science Methods.” *Journal of Political Science* vol. 17, no. 82 (2017): 91.

<sup>29</sup> John Adams, Hafiz T.A. Khan, Robert Raeside, and David White. “Research Method for Graduate Bussiness and Social Science Students.” In *Qualitative Data Analysis*, 325–332. Sage Publications, 2007.

negeri, krisis utang, utang luar negeri, Pelabuhan Hambantota, hubungan Tiongkok-Sri Lanka, dan ekonomi politik Tiongkok-Sri Lanka. Pada tahap penyajian data, penulis menarik hubungan data yang telah direduksi dan dianalisis, kemudian dikaitkan dengan kerangka konsep krisis utang untuk menganalisis penyebab terjadinya krisis utang di Sri Lanka. Di tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti melakukan verifikasi hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian dan menarik generalisasi apa saja tindakan tak bertanggungjawab kreditur dan debitur yang menjadi penyebab terjadinya krisis utang di Sri Lanka akibat Pelabuhan Hambantota.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti format berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab pertama menjelaskan dan menguraikan isi pendahuluan yang melingkupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, dan metodologi penelitian, serta urgensi penelitian.

#### **BAB II Bantuan Luar Negeri Tiongkok kepada Sri Lanka**

Bab kedua menjelaskan gambaran umum bantuan luar negeri, profil Negara Sri Lanka dan bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok kepada Sri Lanka.

#### **BAB III Proyek Kerja Sama Pembangunan Pelabuhan Hambantota**

Bab ketiga menjelaskan tentang kerja sama Sri Lanka dan Tiongkok dalam proyek Pelabuhan Hambantota yang pendanaannya didominasi oleh pinjaman dari Tiongkok dan menimbulkan kerugian yang besar di satu pihak, yaitu Sri Lanka.

Penjelasan ini meliputi skema dan kronologi kerja sama pembangunan Pelabuhan Hambantota.

#### **BAB IV Krisis Utang Sri Lanka dalam Proyek Kerja Sama Pembangunan Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok**

Bab keempat ini berisikan analisis bantuan luar negeri yang diberikan Tiongkok pada Sri Lanka dalam proyek kerja sama pembangunan Pelabuhan Hambantota dan penyebab terjadinya krisis utang, yaitu ketidakmampuan Sri Lanka membayar utangnya pada Tiongkok, menggunakan konsep krisis utang.

#### **BAB V Penutup**

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta jawaban dari hasil perumusan masalah yang telah dianalisis menggunakan konsep krisis utang, serta daftar pustaka.

